



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS PRIYATMONO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 454743

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.472.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/240 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.320.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 960 m2/800 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000		
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
4. Tanah Seluas 19.999 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 502 m2/100 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 502.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	140.000.000
1. MOBIL, HONDA/JAZZ G03 1.5 MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA 1.3 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	177.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.027.686.536
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.816.936.536



III. HUTANG

Rp. 341.666.667

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.475.269.869

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.